BAB IV

PROSES DEMOKRATISASI DI TUNISIA

Gejolak yang berlangsung terus-menerus di Tunisia menimbulkan gerakan rakyat Tunisia dalam memprotes pemerintahan Ben Ali yang dirasa otoriter. Keberhasilannya dalam perekonomian dan politik tidak berlangsung lama karena setelah sekian lama memimpin Tunisia. Ben Ali yang berjanji menghilangkan sisa kediktatoran Bourguiba justru mempraktekkan hal yang sama. Adanya kesejahteraan yang tidak merata pada rakyat Tunisia hingga meningkatnya jumlah pengangguran dan praktek korupsi. Demokrasi yang selalu digemborkan oleh Ben Ali pada awal jabatannya terbukti tidak terlaksana dengan baik. Rakyat Tunisia pun menuntut Ben Ali untuk turun dari jabatannya sebagai presiden.

A. Lengsernya Ben Ali

Ben Ali, Presiden Tunisia yang menjabat sejak tahun 1987 diberi kepercayaan oleh rakyatnya untuk mengubah kehidupan mereka. Rakyat Tunisia berharap besar kepada Presiden Ben Ali agar dalam kepemimpinannya mampu merubah kehidupan mereka menjadi lebih bebas dan terhindar dari pemimpin yang diktator. Masa awal kepemimpinannya, Ben Ali berhasil meningkatkan perekonomian Tunisia. Tunisia bergabung dalam *European Union* (EU) tahun 1995. Berkat bergabung dalam perserikatan tersebut Tunisia mampu meningkatkan hasil ekspor karena komoditas seperti zaitun dan jeruk sangat diminati pasar EU.[60] Pada 1987, Ben Ali memproklamirkan era baru bagi Tunisia berdasarkan pada hukum, HAM, dan demokrasi.

[60] Ibid

Gambar 3. Presiden Tunisia Ben Ali

Ben Ali menyatakan bahwa partai tunggal tidak dapat mewakili seluruh rakyat Tunisia. Partai-partai politik di luar Partai Destour diharapkan mampu bersaing secara sehat dalam mensejahterakan rakyat Tunisia. Muncul partai-partai politik dengan berbagai ideologi yang diusung, seperti *Movement of Socialist Democrats (MDS) dan The* Islamic *Tendency Movement (MTI).* Keberhasilan Ben Ali dalam merebut hati rakyat tidak terlepas dari usahanya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga terus berupaya menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, seperti perubahan Undang-Undang (UU) sistem pemilu yang memungkinkan partai oposisi terwakili dalam parlemen, meskipun jumlah pemilihnya sangat kecil. Karenanya, perubahan UU tersebut mendapat tanggapan positif dari sebagian besar kelompok oposisi. Pemerintah Tunisia masih kaku terhadap kelompok oposisi, seperti menerapkan pengawasan ketat terhadap para mantan tahanan politik. Kebebasan partai masih terbatas, hingga tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang sifatnya berlawanan dengan kebijakan pemerintah.

Tunisia memiliki catatan bagus dalam pengelolaan keuangan. Tunisia dipuji oleh *International Monetary Fund (IMF*), karena fondasi ekonomi yang solid dan upaya nyata

modernisasi. Tunisia juga dijadikan model untuk bebas buta aksara, kesejahteraan sosial, dan peran perempuan dalam masyarakat. Tunisia terhitung relatif sekuler dan pemain moderat di dunia Arab sehingga menjadi sekutu diplomatik serta bisnis AS dan Eropa.[61] Meskipun dikritik kelompok hak asasi manusia, banyak pemilih Tunisia melihat keberlanjutan kekuasaan ini baik untuk negaranya. Rakyat Tunisia memuji Ben Ali telah membuat Tunisia negara yang paling makmur dan stabil di kawasan serta mampu menarik jutaan turis Eropa setiap musim panas. Bahkan oposisi dari Ben Ali sekalipun mengakui pencapaian yang diraihnya di Negara itu.[62] Dalam demokrasi di Tunisia era Zine El Abidine Ben Ali, Rakyat Tunisia berharap dengan bergantinya presiden maka rakyat akan terbebas dari kepemimpinan yang otoriter.

Peran media yang memberitakan kekejaman aparat rezim di bawah rezim Ben Ali tersebutlah yang menjadi faktor penting dan utama bangkitnya gerakan massa untuk menggulingkan Ben Ali yang tidak lagi mampu ditangani oleh aparatur negara. Gerakan sipil (*people power*) yang muncul untuk melawan kendali negara yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak Tunisia merdeka pada tahun 1956. Menanggapi bangkitnya kekuatan sipil itulah sehingga Ben Ali menyatakan bahwa negaranya dalam keadaan darurat dan dia juga bernjanji untuk mengadakan pemilihan legislatif baru dalam waktu enam bulan.

Pada 17 Desember 2010, Buoazizi bersama pedagang lainnya terjaring razia karena dianggap berjualan tanpa izin di Sidi Bouzid. Bouazizi sendiri harus menyetor denda 10 dinar (upah satu hari, setara dengan 7 USD) karena tidak memiliki ijin usaha. Namun, Buoazizi terus berjualan tanpa ijin dan juga tidak membayar denda. Hal tersebut menyebabkan ia dan gerobaknya menjadi salah satu target razia aparat setempat. Bouazizi

---

[61] Kompas.com, 26/10/2009 dengan judul *"Sudah 22 Tahun Ben Ali Berkuasa"*, https://internasional.kompas.com/read/2009/10/26/05564739/Sudah.22.Tahun.Ben.Ali.Berkuasa%20diakses%20pada%2021%20Januari%202018 dikutip pada 18 November 2019

[62] Ibid

ditampar, wajahnya diludahi, timbangan dan gerobaknya juga disita serta mendiang ayahnya dihina oleh aparat tersebut. Perlakuan oknum terhadap Buoazizi yang sewenang-wenang tersebut membuatnya mengadu kepada Gubernur Sidi Bouzid. Pengaduan Bouazizi ini tidak mendapatkan perhatian serius dari Gubernur, bahkan Gubernur menolak untuk melihat dan mendengarkan pengaduan nasibnya. Buoazizi mengancam untuk membakar dirinya setelah Gubernur mengabaikan kedatangannya. Ia kemudian pergi dan kembali satu jam kemudian dengan membawa dua botol bensin kemudian membakar dirinya di depan kantor Gubernur pemerintah daerah, Sidi Bouzid. Buaozizi sempat dilarikan ke rumah sakit dan Presiden Ben Ali sempat menjenguknya. Namun, Bouazizi akhirnya meninggal pada 4 Januari 2011.

Tanggal 4 Januari 2011, sekitar 5000 orang ikut ambil bagian dalam prosesi pemakaman Bouazizi. Mereka di antaranya adalah para pekerja dari organisasi serikat pekerja resmi bernama Kamel Laabidi. Tetapi aparat berusaha mencegah iring-iringan tersebut melewati tempat Bouazizi membakar dirinya agar tidak terjadi kerusuhan. Pada tanggal 18 Desember 2010 dilakukan aksi unjuk rasa yang menyebabkan kerusuhan di kota Sidi Bouzid, bahkan aparat setempat kewalahan mengatasi kerusuhan tersebut. Sejumlah jejaring sosial seperti Facebook dan Youtube menampilkan gambar ketika aparat mengahalau pemuda yang menyerang jendela toko dan merusak mobil. Dalam upaya untuk memadamkan kerusuhan, Presiden Zine Al Abidine Zen al-Abidin Ben Ali mengunjungi Bouazizi di rumah sakit pada 28 Desember 2010.

Kerusuhan terjadi pada Desember 2011 hingga Januari 2011 yang kemudian meningkat sebagai terus-menerus, bahkan demonstrasi telah mencapai ibukota negara, Tunis. Pada 27 Desember 2010, sekitar 1000 warga bersama-sama dengan penduduk Sidi Bouzid mengekspresikan solidaritas menyerukan suatu aksi bersama menentang pemerintahan. Demonstrasi yang dimotori aktivis serikat buruh independen, akhirnya dihentikan oleh pasukan keamanan. Demonstrasi juga menyebar ke Kota Sousse, Sfax fan Meknasy. Federasi Serikat Buruh Tunisia kembali mengadakan rapat umum di Gafsa yang juga diblokir

oleh pasukan keamanan. Pada saat yang sama sekitar 300 pengacara mengadakan sebuah aksi demo dekat pemerintah istana di Tunis. Demonstrasi kembali dilanjutkan lagi 29 Desember. Kekuasaan Presiden akhirnya lepas dari genggaman Zein al-Abidin Ben Ali ketika mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan tanggal 14 Februari 2011 sekitar pukul 16:00 waktu setempat dan pernyataannya didelegasikan kepada Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi untuk bertindak sebagai kepala negara selama ketidakhadirannya. Tuntutan adanya demokrasi dan sistem pemerintahan yang otoritarian ini merupakan gerakan rakyat yang tidak ditopang oleh partai atau tokoh dari ideologi tertentu ini, tergolong berhasil dengan jatuhnya Presiden Ben Ali setelah sekitar 30 tahun berkuasa.

Pada hari Sabtu 22 Januari 2011, pengunjuk rasa memadati pusat Kota Tunis dan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi. Terdorong oleh keberhasilan mereka menggulingkan Presiden Zein al- Abidin Ben Ali. Pernyataan Perdana Menteri Ghannouchi mengambil alih kekuasaan di Tunisia namun kekuasaan itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 Februari 2011 Pemerintah Tunisia baru melalui kementrian Dalam Negeri Tunisia secara resmi mengakhiri jam malam di seluruh penjuru negara Tunisia. Hal ini dilakukan untuk mencegah segala hal yang mungkin dapat mengancam keamanan negara dan dalam memastikan keamanan masyarakat serta perlindungan bagi fasilitas umum dan swasta. Namun sampai kapan status darurat negara tidak dapat dipastikan.[63] Mahkamah Konstitusi Tunisia menetapkan bahwa Zein al-Abidin Ben Ali berada dalam kondisi sementara tidak menjalankan tugas dan bahwa presiden sebenarnya kosong. Pengaturan yang telah Ben Ali buat dengan Perdana Menteri sebelum meninggalkan negara itu ditemukan tidak konstitusional berdasarkan Pasal 57 dari konstitusi.

Mahkamah Konstitusi, sebagai otoritas hukum tertinggi pada isu-isu konstitusional, mengumumkan transisi pada hari Sabtu, dan menyatakan bahwa Fouad Mebazaa selaku Ketua

---

[63] Apriadi Tamburaka . 2011. Revolusi Timur-Tengah. PT Buku Seru: Jakarta. Hal 28-35

Parlemen telah ditunjuk sebagai presiden interim. Mebazaa mengambil sumpah di kantornya di parlemen, dihadapan Ketua Senat Abdallal Kallel dan disaksikan oleh perwakilan dari kedua lembaga tersebut. Diumumkan pula bahwa ketua parlemen akan menduduki jabatan presiden sementara dan pemilihan akan diadakan dalam jangka waktu antara 45 dan 60 hari.

Kesepakatan antara pemerintah interim dan UGTT baru dicapai pada tanggal 8 Februari 2011. Rancangan Undang-Undang untuk memberikan Fouad Mebazaa kekuasaan darurat disahkan pada tanggal 9 Februari 2011. Rancangan Undang-Undang ini juga memungkinkan Mebazaa untuk meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia tanpa parlemen sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa Tunisia akan meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, dengan Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional, Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyikasaan dan Perlakuan atau Perlakuan atau Penghukuman, Protokol Pertama dan Kedua Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Langkah pertama yang diambil pada Rancangan Undang-Undang keadaan darurat yaitu akan memberikan kekuasaan kepada presiden sementara, Fouad Mebazaa sehingga dia dapat mengambil alih kekuasaan RCD di parlemen.[64]

Pada Juni 2011, Ben Ali kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun karena terbukti menggelapkan uang negara. Pengadilan militer Tunisia menyatakan mantan Presiden Zine El Abidine Ben Ali juga telah bersalah karena menyulut kekerasan dan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Pengadilan menjatuhkan vonis dalam kasus ini pada Rabu, 13 Juni 2012 secara in absentia karena mantan penguasa Tunisia itu sekarang berada di Arab Saudi. Dalam putusannya pengadilan menyatakan Ben Ali bersalah "menyulut kekacauan, pembunuhan dan penjarahan". Ben Ali dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan empat orang pada Januari 2011, sehari

---

[64] Kavakeb, Dominic, 2011, *The Battle of Tunis*, http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=11546 dikutip pada 18 November 2019

setelah dia meninggalkan Tunisia. Insiden terjadi ketika pasukan keamanan mengeluarkan tembakan ke arah kelompok pengunjuk rasa di kota Ouardanine. Keempat korban pengunjuk rasa tewas ditembak ketika mereka berusaha menggagalkan penerbangan sepupu Ben Ali, Kais, sehari setelah mantan penguasa Tunisia tersebut terbang ke Arab Saudi pada 14 Januari 2011. Kemudian, Pada tahun 2012, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan demonstran saat gelombang revolusi bergemuruh.[65]

B. Foued Mebazaa Sebagai Presiden Sementara

Pasca lengsernya Ben Ali sebagai presiden di Tunisia tahun 2011, masyarakat menuntut pemerintah Tunisia untuk segera membentuk pemerintahan sementara. Presiden sementara Foued Mebazaa meminta Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi untuk membentuk pemerintah koalisi. Langkah ini dipandang sebagai upaya dalam menyelamatkan pemerintah dari ambang kehancuran. Mebazaa mengatakan kepentingan nasional lebih diutamakan dengan membentuk pemerintah persatuan nasional, tindakan Mebazaa tersebut mendapat dukungan dari para pemimpin oposisi di Tunisia. Pemerintah persatuan darurat akan secepatnya dibentuk untuk mengakhiri kerusuhan yang mencekam negara tersebut.

---

[65] Internasional.republika.co.id, 20/09/2019, *Mantan Presiden Tunisa Ben Ali meninggal Dunia*, https://internasional.republika.co.id/berita/py3gnn383/mantan-presiden-tunisia-ben-ali-meninggal-dunia, dikutip pada 18 November 2019

Gambar 4. Presiden Tunisia Foued Mebazaa

Presiden sementara Tunisia Fouad Mebazaa mengumumkan rincian pemilu yang dijanjikan setelah tumbangnya rezim presiden Ben Ali. Mebazza mengatakan pemungutan suara untuk membentuk dewan perwakilan yang akan merancang ulang konstitusi akan digelar 24 Juli mendatang. Hingga pemilu digelar maka pemerintahan interim tetap akan menjalankan roda pemerintahan Tunisia. Mebazza menegaskan tetap menjabat sebagai presiden sementara meski konstitusi saat itu membatasi masa jabatan seorang pejabat presiden hanya selama 60 hari. Setelah terpilih, dewan konstitusi dapat menunjuk pemerintahan baru atau meminta pemerintah sementara untuk tetap menjalankan tugas hingga pemilihan presiden atau parlemen digelar.[66]

Mebazaa juga mengatakan semua partai politik termasuk oposisi akan diajak berkonsultasi. Mebazaa akan tetap menjadi presiden sementara sampai parlemen baru mulai bekerja, lapor kantor berita resmi negara itu. Setidaknya tiga pejabat

---

[66] BBC.com, 04/03/2011, dengan judul *"Pemerintah Tunisia Canangkan Pemilu"*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/03/110303_tuniselection dikutip pada 10/09/2019

pemerintah Tunisia mengundurkan diri, setelah pengunduran diri Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi. Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah, Ahmad Ibrahim dan Sekretaris Pendidikan Tinggi, Faouzia Farida Charfi, juga mundur hari Selasa, lapor kantor berita Tunis Afrique Presse. Mohamed Nouri Jouini, menteri kerjasama internasional dan perencanaan, mengundurkan diri Senin, kata kanto berita itu. Setelah Ghannouchi mengundurkan diri, Presiden Mebazza menetapkan Al-Baji Qa'ed Al-Sebsi sebagai perdana menteri baru negara itu.[67]

C. Terpilihnya Moncef Marzouki

Pada Oktober 2011, Tunisia menyelenggarakan pemilihan presiden secara umum untuk pertama kalinya. Rakyat Tunisia pun sangat antusias untuk menggunakan hak pilih pertamanya. Ketua Komisi pemilihan Tunisia, Kamel Jendoubi, mengumumkan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan independen. Pengamat dari Uni Eropa mengatakan hampir tidak ada peluang untuk mencuri atau berusaha merusak hasil pemilihan umum. Sebanyak 40 ribu aparat keamanan diturunkan untuk mengamankan pemilu. Setidaknya lebih dari 11 ribu kandidat ikut dalam pemilihan yang mewakili 80 partai politik. Partai Islam moderat Ennahda, yang dulunya saat pemerintahan Ben Ali partai ini dilarang, justru diperkirakan akan memenangi pemilihan, meski sulit meraih suara mayoritas, sehingga ada kemungkinan Ennahda akan melakukan koalisi jika menang.[68]

Pada tanggal 13 Desember 2011, Aktivis HAM dan mantan pemimpin oposisi Tunisia, Moncef Marzouki terpilih sebagai Presiden Tunisia yang baru. Marzouki merupakan presiden pertama yang terpilih dalam pemilu pasca revolusi terjadi di Tunisia. Saat hasil pemilu diumumkan, Marzouki tampil dengan pakaian kebesarannya, yakni setelan jas warna

---

[67] Ibid hlm 7

[68] Tempo.com, 24/10/2011, *"Tunisia Gelar Pemilu Pertama"*, https://dunia.tempo.co/read/362884/tunisia-gelar-pemilu-pertama/full&view=ok dikutip pada 18 November 2019

abu-abu dengan kemeja putih tanpa dasi dan dilengkapi kacamata berbingkai besar yang menjadi ciri khasnya. Marzouki yang merupakan capres dari Partai Republik ini terpilih menjadi Presiden Tunisia setelah memperoleh 153 suara dari total 217 suara milik anggota parlemen.

Tugas pertama Marzouki adalah menunjuk Perdana Menteri Tunisia yang baru. Diperkirakan, kandidat presiden kedua dari Partai Ennahda Islam, Hamadi Jebali yang akan ditunjuk dan menunggu persetujuan parlemen. Pada masa kepemimpinan Presiden Ben Ali, Marzouki yang merupakan opisisi terkuat ini sempat diasingkan ke Prancis selama satu dekade. Marzouki selama ini dikenal sebagai Ketua Liga Tunisia bagi Penegakan HAM (*Tunisian League for the Defence of Human Rights*/LTDH) sejak tahun 1989.[69] Marzouki memiliki tujuan dalam memimpin Tunisia ialah untuk mempromosikan Arab-Muslim identitas kita dan terbuka untuk dunia. Serta akan melindungi wanita, mulai dari yang bercadar hingga yang tidak memakai kerudung. Hak-hak kesehatan dan pendidikan juga akan ia penuhi.[70]

Pada awal pemerintahan era Marzouki tidaklah mudah. Marzouki bertekad membenahi ekonomi Tunisia salah satunya ialah mengurangi jumlah pengangguran di Tunisia. Tunisia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi pada saat itu, sehingga presiden Marzouki memutuskan untuk menurunkan gajinya sebagai presiden. Juru bicara kepresidenan Adnane Mansar mengatakan, pendapatan kotor bulanan Marzouki adalah 30 ribu dinar Tunisia (13.600 euro), dan gaji persihnya adalah 20 ribu dinar (9.100 euro) per bulan. Dia juga meminta adanya pengurangan pengeluaran lembaga kepresidenan. Bank Dunia

---

[69] News.detik.com, 13/12/2011, *Moncef Marzouki, Presiden Tunisia yang Baru Pasca Revolusi*, https://news.detik.com/internasional/1790426/moncef-marzouki-presiden-tunisia-yang-baru-pasca-revolusi dikutip pada 18 November 2019

[70] Internasional.republika.co.id, 14/12/2011, *Moncef Marzouki Resmi Jabat Presiden Tunisia*, https://internasional.republika.co.id/berita/lw653i/moncef-marzouki-resmi-jabat-presiden-tunisia dikutip pada 18 November 2019

juga telah menyetujui bantuan pinjaman US$ 100 juta untuk membantu UKM di Tunisia, guna memulihkan sektor swasta negara tersebut. Disebutkan, ada sekitar 62 ribu pengusaha di Tunisia yang mempekerjakan 1,2 juta orang, dan sektor ini yang akan dibantu. Pada Januari 2014, IMF merilis bantuan US$ 500 juta untuk membantu Tunisia dalam mengatasi kesejahteraan rakyat Tunisia.[71]

Marzouki juga memfokuskan kepemimpinannya dalam menjalankan demokrasi di Tunisia melalui HAM dalam bentuk kebebasan pers. Seperti yang telah diketahui pada era Ben Ali, pers di Tunisia tidak memiliki kekuasaan yang bebas dalam mengkritik pemerintahan. Hal ini diperparah dengan adanya sejumlah wartawan yang di penjara dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karenanya, Marzouki sebagai presiden terpilih pertama di Tunisia berusaha membebaskan pers dalam berpendapat.

---

[71] Detik.com, *"Negara Krisis, Presiden Rela Gaji diturunkan"*, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2559447/negaranya-krisis-presiden-ini-rela-gajinya-turun-lebih-dari-50 dikutip pada 7 November 2019